

## **EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENURUNAN KEMISKINAN KELURAHAN SIDOTOPO KOTA SURABAYA**

**Devani Marlia Yunisar**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[devanimarlia@gmail.com](mailto:devanimarlia@gmail.com)

**Indah Murti**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[endah@untag-sby.ac.id](mailto:endah@untag-sby.ac.id)

**Supri Hartono**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[suprihartono@untag-sby.ac.id](mailto:suprihartono@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak, kemiskinan mencerminkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi sepenuhnya. Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program sosial. Undang-undang ini menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah secara aktif merancang berbagai program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti bantuan sosial. Namun, implementasi program-program tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan anggaran, serta efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah layanan Kesehatan. Dimana setiap individu sebenarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan menegaskan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, berhak mendapatkan perawatan medis yang layak dan berkualitas.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, Kemiskinan. Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya

### **ABSTRACT**

Poverty is a complex social problem and continues to be a major concern in national development. As a condition in which individuals or groups are unable to meet their basic needs properly, poverty reflects the existence of social and economic disparities that have not yet been fully resolved. In the context of Indonesia, social welfare has been regulated in Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, which is the basis for planning and implementing various social programs. This law states that social welfare is a condition in which the material, spiritual, and social needs of citizens are met so that they can live properly and are able to develop themselves so that they can carry out their social functions. The government actively designs various programs and policies to overcome poverty, such as social assistance. However, the implementation of these programs often faces various challenges, such as inaccurate targeting, budget constraints, and effectiveness that still needs to be improved. Poverty has a broad impact on various aspects of life, especially in the social and economic fields. One of the most affected sectors is health services. Where every individual actually has the same right to gain access to adequate health facilities. The principle of equality in health services emphasizes that all people, regardless of economic background, have the right to receive adequate and quality medical care.

**Keywords:** *Family Hope Program, Poverty. Sidotopo Village, Surabaya City*

#### **A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, mencakup keterbatasan akses di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Kondisi kemiskinan dapat menjadi penghambat bagi perkembangan suatu negara, terutama karena hak-hak dasar manusia tidak terpenuhi. Dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan memiliki efek berantai (multiplier effect) yang memengaruhi tatanan sosial secara luas. Pemerintah secara aktif merancang berbagai program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti bantuan sosial. Namun, implementasi program-program tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan anggaran, serta efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Berbagai faktor struktural dan sistemik masih menjadi penghambat dalam menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan. Oleh karena itu, evaluasi dan optimalisasi program penurunan kemiskinan menjadi krusial agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah layanan Kesehatan. Dimana setiap individu sebenarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan menegaskan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, berhak mendapatkan perawatan medis yang layak dan berkualitas.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang oleh pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program

Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Keluarga Harapan menargetkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Secara nasional, dasar hukum PKH tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan tentang Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada individu atau keluarga miskin yang telah tercatat dalam data terpadu penanganan fakir miskin. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya, yang mengatur mekanisme pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang diterapkan di Kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebagai kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Surabaya menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk kesenjangan kesejahteraan di antara warganya. Sebagai program bantuan sosial, PKH memiliki mekanisme penerimaan yang terstruktur agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah menetapkan pedoman pelaksanaan yang mengatur tahapan penerimaan, mulai dari perencanaan hingga penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap tahap dalam proses ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penurunan Kemiskinan dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Penurunan Kemiskinan Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya”. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat luas. Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah “whatever governments choose to do or not to do”, yang menekankan bahwa setiap tindakan atau ketidaktindakan pemerintah memiliki konsekuensi dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, dan dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, program, maupun pelayanan publik. Dengan demikian, 20 kebijakan publik bukan sekadar produk hukum, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bersama dan memperbaiki kondisi sosial.

Menurut Theodoulou (1995: 7) menyatakan kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti, "... resolving conflict over scarce resources, regulating behavior, motivating collective action, protecting rights. and directing benefits toward the public interest." Dalam kata lain, kebijakan mestinya dapat menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumberdaya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar, dan lainnya.

### **Evaluasi Program**

Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu program guna mengetahui apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan penafsiran informasi yang mendalam untuk memperoleh gambaran mengenai keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Menurut Suharto (2021), evaluasi program bertujuan untuk memberikan informasi penting bagi para pengambil kebijakan dan manajer program agar dapat memperbaiki atau mengembangkan kebijakan lebih lanjut sesuai kebutuhan lapangan. Beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam evaluasi program adalah evaluasi formatif, sumatif, dan dampak.

Evaluasi formatif dilakukan selama pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik yang dapat langsung diterapkan dalam proses berjalan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan. Evaluasi dampak dilakukan untuk menilai efek program pada perubahan atau peningkatan kondisi sasaran yang dituju (Widiastuti & Pratama, 2019). Pemilihan pendekatan evaluasi ini disesuaikan dengan kebutuhan program dan tingkat analisis yang diperlukan. Evaluasi program sangat penting karena memberikan gambaran objektif tentang efektivitas program dalam pencapaian tujuannya. Dengan evaluasi, pihak manajemen dapat mengetahui sejauh mana penggunaan sumber daya telah efektif, apakah metode pelaksanaan sudah tepat, serta dampak yang dihasilkan pada masyarakat sasaran. Suryanto dan Kurniawan (2020) menekankan bahwa evaluasi program membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mempromosikan akuntabilitas, dan menyediakan dasar data yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. PKH pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2007 sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH menyediakan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, balita, lansia, atau penyandang disabilitas. Bantuan ini diberikan dengan syarat agar keluarga penerima memenuhi komitmen dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak (Kementerian Sosial, 2021).

PKH didasarkan pada prinsip bahwa bantuan tunai dapat menjadi instrumen untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Melalui bantuan ini, keluarga miskin didorong untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan gizi yang baik, sehingga anak-anak dalam keluarga penerima bantuan dapat memperoleh

pendidikan yang lebih baik dan hidup yang lebih sehat. (Kurniawan dkk., 2021) Selain sebagai bantuan tunai, PKH juga memiliki aspek pemberdayaan. Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengikuti berbagai sesi pendampingan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam 25 mengelola keuangan, meningkatkan pendidikan anak, dan kesehatan keluarga. Pendamping PKH, yang berasal dari berbagai latar belakang, berperan penting dalam memastikan bahwa KPM memahami dan memenuhi komitmen PKH, sehingga program ini berjalan efektif dan berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka (Wulandari & Pratama, 2020). Manfaat PKH bagi masyarakat miskin di Indonesia cukup signifikan. Studi menunjukkan bahwa keluarga yang menerima bantuan PKH memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan anak dan layanan kesehatan dibandingkan keluarga yang tidak menerima bantuan. PKH juga terbukti mengurangi kerentanan keluarga terhadap kemiskinan ekstrem, karena bantuan tunai yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 (Hidayat & Nugraha, 2021).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi program keluarga harapan dalam penurunan kemiskinan di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara mendalam berdasarkan realitas di lapangan, terutama terkait dengan kondisi, tantangan, dan kualitas program tersebut.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Pegirian No. 240-244, Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur 60152. Kelurahan ini dipilih karena merupakan wilayah padat penduduk dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan menjadi sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, terdapat keterlibatan aktif dari pendamping PKH dan pemerintah kelurahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga relevan untuk dievaluasi dalam konteks efektivitas program PKH.

Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam untuk menilai berbagai aspek dari program.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dari hasil penelitian merupakan proses interpretasi atas data yang telah dikumpulkan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep dari para ahli guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan temuan lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka teori untuk memperkuat argumen dan pengembangan pemikiran ilmiah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini menyediakan empat dimensi utama yang akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yakni: (1) konteks, untuk menilai kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat; (2) input, untuk melihat sumber daya dan strategi yang digunakan; (3) proses, untuk menilai pelaksanaan program di lapangan; dan (4) produk, untuk mengevaluasi hasil atau dampak program terhadap penerima manfaat.

### **1. Konteks**

Evaluasi konteks bertujuan untuk menilai sejauh mana kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Sidotopo sebelum dan sesudah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta melihat apakah program tersebut telah diterapkan secara tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan, mayoritas masyarakat Kelurahan Sidotopo sebelum adanya PKH berada dalam kondisi ekonomi yang cukup memprihatinkan. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap dan jauh dari kata layak. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga masih sangat terbatas. Tingkat pendidikan penduduk di wilayah ini umumnya rendah, yang berdampak pada keterbatasan peluang kerja dan pendapatan keluarga.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergabung dalam PKH umumnya berasal dari kalangan rumah tangga miskin, dengan beban tanggungan yang tinggi. Dalam banyak kasus, satu rumah dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga, namun hanya satu hingga dua orang saja yang bekerja, dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga. Faktor rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pendapatan dan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Program PKH hadir sebagai respons terhadap kondisi sosial ekonomi tersebut, dan terbukti memberikan kontribusi awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Setelah program dijalankan, terjadi peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan dan pemanfaatan layanan kesehatan dasar seperti posyandu. Meski demikian, perubahan kondisi ekonomi secara menyeluruh masih berjalan lambat, dan belum sepenuhnya tercapai dalam jangka pendek.

Bagi sebagian besar penerima, program PKH memberikan dampak langsung dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Bantuan rutin yang diberikan dinilai cukup meringankan beban ekonomi rumah tangga, terutama dalam hal pemenuhan biaya sekolah anak dan kebutuhan pokok sehari-hari. Secara keseluruhan, dari sisi konteks, PKH dinilai sebagai program yang tepat sasaran di Kelurahan Sidotopo. Program ini hadir dalam kondisi masyarakat yang memang membutuhkan intervensi sosial dan ekonomi, serta memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam hal peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun tantangan struktural seperti rendahnya pendapatan dan tingkat pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah ke depan.

## **2. Input (Masukan)**

Evaluasi input bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan dukungan yang tersedia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidotopo. Aspek ini mencakup koordinasi antarlembaga, kecukupan sarana dan prasarana, serta pelatihan dan pembekalan bagi pelaksana program dan penerima manfaat.

Koordinasi antara pihak kelurahan dan pendamping PKH berjalan secara intensif, terutama saat terjadi pembaruan data atau muncul keluhan dari masyarakat. Kerjasama ini penting dalam menjaga ketepatan sasaran program serta menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Kelurahan berperan aktif dalam menyampaikan laporan masyarakat dan mendukung kelancaran komunikasi antar pihak terkait.

Dari sisi sarana dan prasarana, pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidotopo telah mendapatkan dukungan dari kelurahan dan Dinas Sosial, terutama dalam penyediaan tempat pertemuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun lokasi rapat koordinasi. Namun demikian, masih ditemukan kendala teknis seperti keterbatasan perangkat elektronik (laptop, printer) dan koneksi internet yang tidak selalu stabil, sehingga sebagian besar pendamping PKH terpaksa menggunakan fasilitas pribadi untuk mendukung proses administrasi dan pelaporan data.

Pelatihan dan pembekalan bagi pendamping PKH telah diberikan sebelum mereka turun ke lapangan. Materi pelatihan mencakup pemahaman prinsip-prinsip dasar PKH, teknik pendampingan terhadap KPM, serta manajemen kasus. Selain pelatihan awal dari Kementerian Sosial, pendamping juga menerima pelatihan lanjutan dari Dinas Sosial, termasuk topik-topik seperti motivasi keluarga, perlindungan anak, dan penguatan karakter. Pelatihan ini menjadi penting untuk memastikan pendamping memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan peran mereka.

Di sisi penerima manfaat, kegiatan penyuluhan juga telah dilakukan oleh pendamping, terutama dalam pertemuan kelompok rutin. Materi yang disampaikan mencakup manajemen keuangan keluarga, pentingnya pendidikan bagi anak, dan peran orang tua dalam menjaga kesehatan keluarga. Kehadiran penyuluhan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi sarana penguatan nilai-nilai kemandirian bagi KPM.

Secara keseluruhan, dari aspek input dapat disimpulkan bahwa Program PKH di Kelurahan Sidotopo didukung oleh sistem koordinasi yang baik dan pelatihan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa hambatan teknis dalam hal sarana penunjang, pelaksanaan program tetap dapat berjalan berkat komitmen dan inisiatif para pelaksana di lapangan.

## **3. Process (Proses)**

Evaluasi proses dilakukan untuk menilai bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan di lapangan, termasuk pemantauan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana pelaksana dan penerima program mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Secara umum, pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidotopo sudah berjalan dengan cukup baik. Pendamping PKH aktif melakukan kegiatan rutin seperti pertemuan kelompok, pendataan keluarga penerima manfaat (KPM), serta

memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa keluarga penerima benar-benar memahami tanggung jawab mereka, seperti memastikan anak-anak tetap bersekolah dan mengikuti kegiatan kesehatan seperti posyandu.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan validitas data penerima bantuan. Masih terdapat kasus di mana bantuan diterima oleh warga yang sudah tergolong mampu, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan belum terdaftar dalam program. Hal ini disebabkan karena proses pemutakhiran data masih terpusat dan tidak bisa langsung diperbarui oleh pihak kelurahan, sehingga proses perbaikannya memerlukan waktu dan koordinasi lebih lanjut.

Selain itu, terdapat kendala teknis di lapangan, seperti hilangnya kartu ATM yang digunakan untuk mencairkan bantuan, atau keterlambatan pencairan dana yang tidak sesuai dengan jadwal. Meski bukan hal yang terjadi setiap saat, keterlambatan ini cukup mempengaruhi kepercayaan dan kenyamanan sebagian KPM dalam menerima bantuan.

Dari sisi pengawasan, pihak kelurahan turut berperan aktif dalam memantau pelaksanaan program melalui koordinasi rutin dengan pendamping PKH. Setiap aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dan diteruskan ke Dinas Sosial. Selain itu, kelurahan juga membantu dari sisi administrasi dan penyediaan tempat kegiatan bila diperlukan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH menunjukkan adanya komitmen dari semua pihak, meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Proses pelaksanaan yang baik namun belum sempurna ini menunjukkan pentingnya perbaikan sistem data serta peningkatan kapasitas koordinasi antara instansi terkait agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

#### **4. Product (Produk)**

Berdasarkan informasi dari berbagai informan, program PKH dinilai telah memberikan kontribusi positif, meskipun belum mampu secara signifikan menurunkan angka kemiskinan secara menyeluruh. Bantuan yang diberikan memang bersifat terbatas, tetapi sangat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak dan layanan kesehatan. Hal ini membuat para KPM tidak terlalu terbebani dalam membiayai keperluan sekolah atau membeli kebutuhan sehari-hari, yang sebelumnya menjadi beban utama dalam rumah tangga.

Program ini juga dinilai mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyekolahkan anak dan menjaga kesehatan keluarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada keluarga penerima manfaat yang mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan sebagai bentuk upaya memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara mandiri.

Di sisi lain, penerima manfaat juga menyampaikan bahwa bantuan ini memberikan dampak langsung terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Meskipun tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup, bantuan PKH telah memberikan ruang bagi keluarga miskin untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. KPM merasa terbantu terutama dalam masa-masa krisis, seperti saat



penghasilan utama keluarga tidak mencukupi. Beberapa penerima yang bekerja di sektor informal, seperti berdagang makanan ringan atau jasa servis, mengakui bahwa bantuan PKH berfungsi sebagai penyangga kebutuhan dasar, seperti makan dan biaya sekolah.

Harapan dari masyarakat terhadap keberlanjutan program ini cukup tinggi. Banyak KPM yang berharap agar PKH dapat terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan dari segi nilai bantuan atau disertai dengan program pemberdayaan ekonomi tambahan yang lebih konkret. Mereka menilai bahwa keberadaan program ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup keluarga, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

Secara umum, hasil evaluasi produk menunjukkan bahwa PKH telah memberikan dampak sosial yang positif, terutama dalam mempertahankan taraf hidup minimum keluarga miskin. Namun demikian, untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan, dibutuhkan sinergi dengan program pemberdayaan lain yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi KPM dalam jangka panjang.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi positif dalam membantu keluarga miskin, meskipun belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Dari aspek konteks, PKH hadir di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memang membutuhkan intervensi. Sebagian besar warga hidup dalam keterbatasan akses pendidikan, penghasilan tidak tetap, dan minim fasilitas kesehatan. Kehadiran program ini terbukti relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan layanan kesehatan dasar.

Pada aspek input, pelaksanaan program didukung oleh kerja sama lintas sektor, pelatihan bagi pendamping, serta penyuluhan rutin kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Meskipun terdapat kendala teknis seperti keterbatasan sarana pendukung, komitmen pelaksana di lapangan mampu menjaga kelangsungan program. Dari sisi proses, kegiatan pendampingan dan pemantauan telah dilaksanakan secara rutin. Namun, sejumlah kendala tetap muncul, terutama dalam hal validitas data penerima dan keterlambatan pencairan bantuan. Meski demikian, koordinasi antar pihak terkait berjalan cukup baik dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul.

Sementara pada aspek produk, program ini dinilai berhasil meringankan beban ekonomi keluarga miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan kesehatan. Dampak langsung berupa peningkatan ketahanan rumah tangga dirasakan oleh mayoritas KPM, meskipun efek jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi masih perlu diperkuat dengan dukungan program pemberdayaan lanjutan. Secara keseluruhan, PKH di Kelurahan Sidotopo telah berjalan sesuai dengan tujuannya sebagai jaring pengaman sosial. Program ini berhasil meningkatkan taraf hidup minimum keluarga miskin dan memberikan

fondasi bagi peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan. Namun untuk mencapai penurunan kemiskinan yang lebih komprehensif, sinergi lintas program dan perbaikan sistem perlu terus diupayakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Hidayat, R., & Nugraha, A. (2021). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap ketahanan ekonomi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(2), 88–95.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. <https://kemensos.go.id>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021*. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Kurniawan, A., Mulyadi, S., & Fitriani, H. (2021). *Program Keluarga Harapan dan strategi penanggulangan kemiskinan*. Universitas Airlangga Press.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya. (2023). Pemerintah Kota Surabaya.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.
- Suharto, E. (2021). *Kebijakan sosial: Sebuah pengantar*. Refika Aditama.
- Suryanto, E., & Kurniawan, A. (2020). *Manajemen program sosial*. Intrans Publishing.
- Theodoulou, S. Z. (1995). *Public policy: The essential readings*. Prentice Hall.
- Widiastuti, F., & Pratama, Y. (2019). Evaluasi program pemberdayaan sosial dan dampaknya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 120–134.
- Wulandari, N., & Pratama, D. (2020). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. *Jurnal Sosiohumaniora*, 22(3), 210–219.